BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya , ternyata Partai Hati Nurani Rakyat menghadapi tantangan – tantangan baik itu dari internal maupun eksternal keorganisasian nya , yakni dari internal keorganisasian nya Dewan Pimpinan Cabang Sampang memiliki berbagai permasalahan .Pertama, kurangnya popularitas dan ketokohan pemimpin DPC Sampang , sehingga berdampak pada kelangsungan proses sosialisasi politik , dimana dalam hal ini partai memiliki link dan basis massa yang sedikit dan partai juga harus memulai dari awal untuk mengenalkan sosok pemimpinnya dan program – program partainya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Partai Hanura sebelum pada akhirnya berlanjut kepada kerjasama politik . Kedua yakni kinerja pengurus DPC yang kurang maksimal . Dalam hal ini , pengurus – pengurus DPC Hanura baru memulai proses kaderisasi perempuan adalah ketika satu tahun menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014 , bukan dari sejak awal DPC Hanura Sampang didirikan di kota tersebut dan proses kaderisasi seharusnya berjalan setiap hari dan berkelanjutan melalui program – program internal partai politik.

Ketiga adalah finansial Internal yang belum kuat , karena partai kecil dan belum bisa menunjukkan prestasi di Sampang , sehingga belum mendapatkan kucuran dana yang cukup untuk membiayai seluruh biaya kaderisasi. Keempat , minimnya underbow , jaringan – jaringan penggerak yang dapat digunakan untuk

menjaring kader – kader perempuan . Dan yang kelima terkait dengan Sumber Daya Manusia Partai yang Masih Terbatas di Kepengurusan Sampang untuk melakukan kaderisasi perempuan , dimana dalam hal ini pengurus laki – laki DPC Sampang lah yang harus mencari kader perempuan mulai dari awal , karena banyak sekali kader – kader perempuan sebelumnya yang memutuskan untuk keluar dan non aktif dari kegiatan partai .

Sementara faktor eksternalnya adalah tantangan – tantangan yang berasal dari objek pengkaderan itu sendiri , yakni kondisi sosio kultur perempuan – perempuan Sampang . Dimana dalam hal ini terdapat beberapa kondisi sosio kultur atau kebudayaan perempuan Sampang yang tidak mendukung tujuan keberlangsungan aturan mengenai kuota 30 persen perempuan , diantaranya adalah adanya Presepsi Negative tentang makna ,'' Politik ,'' pada masyarakat Sampang . Kedua , dominasi lelaki dan Kyaisme sangat kuat di Sampang , sehingga perempuan disana dirasa kurang berdaya untuk dijadikan wakil rakyat . Ketiga , Paradigma Perempuan Sampang yang identik dengan macak , masak , manak , yakni disini adalah perempuan identik dengan kewajiban mengurus keluarganya yakni suami dan anak- anaknya di rumah saja , bukan untuk sibuk meraih kekuasaan di luar rumah . Ke-empat , tidak diprioritaskannya pendidikan bagi kaum wanita menjadikan tingkat pendidikan perempuan rendah tergolong rendah , dibuktikan dengan relitas pernikahan yang sering dilakukan seusai perempuan tersebut tamat Sekolah Menengah Pertama , tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi , sehingga dalam hal ini akan terasa sulit sekali untuk mendapatkan kader – kader perempuan yang berkualitas

dan memenuhi kriteria peraturan 30 persen kuota perempuan . Lalu , yang terakhir adalah finansial perempuan itu bergantung kepada lelaki karena mayoritas perempuan Sampang adalah ibu rumah tangga (bukan wanita karir), maka keuangannya sangat bergantung kepada suaminya, sehingga susah bagi mereka untuk dapat membiayai kampanyenya dengan uang pribadi , mengingat Partai Hanura juga masih tergolong partai kecil yanag mana sumber keuangannya-pun masih sangat terbatas .

Kemudian Partai Hanura juga melakukan upaya – upaya untuk mendapatkan kader – kader perempuan untuk dijadikan sebagai calon legislativ perempuan dari partai yang bersangkutan . Pertama adalah pemberian Kelonggaran dan kemudahan untuk menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sampang yakni syarat bisa baca tulis , lulusan SMA , tidak memiliki kartu anggota partai politik ganda , serta tidak dipungut biaya atau gratis . Kedua , melakukan lobi – lobi kepada informal Leader Kabupaten Sampang yakni Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama , seperti keluarga Kyai serta para Blater . Dalam hal ini melobi Kyai – kyai dan blater – blater yang masih netral untuk diajak mendukung Partai dan menyumbangkan kader perempuannya untuk dijadikan calon legislative , langkah kedua adalah jika menghadapi kyai dan blater yang sudah brafiliasi dengan partai politik yang lain , maka akan melobinya untuk membagi porsi suara basis massanya ke kantong Partai Hati Nurani Rakyat . Ketiga , Pemberian Bantuan – Bantuan Kepada Kelompok Pengajian ,Pesantren dan Warga – Warga Kampung seperti kerudung gratis ,alat tulis gratis , ziarah gratis, bantuan makanan dan snack pada pengajian dan acara bancaan dan lain

sebagainya. Keempat, melakukan lobi – lobi keluarga Pengurus laki – laki Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat , Kabupaten Sampang untuk lebih menghemat waktu , biaya dan tenaga , serta mudah untuk mempertahankan keloyalitasannya , terutama seusai pemilu berakhir .

Sesuai dengan data – data yang telah diulas diatas , Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Sampang sebenarnya tidak melakukan proses kaderisasi calon legislatif perempuan sama sekali . Tetapi hanya sebatas mencari perempuan – perempuan Sampang yang bersedia untuk dijadikan sebagai calon legsilatif perempuan . Hal ini terjadi karena pada kenyataanya DPC Hanura Sampang tidak memiliki program – program internal partai tertentu untuk melaksanakan fungsi rekrutment politik , seperti seleksi calon kader atau seleksi calon pengurus DPC Hanura maupun seleksi Calon legislatif perempuan Hanura . Akan tetapi hal – hal yang terjadi adalah Partai Hanura hanya mencari kader kader perempuan secara pragmatis dan sifatnya transaksional menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Hal tersebut terbukti dengan adanya fakta – fakta , diantara proses perekrutan yang berorientasi kepada semata – mata adanya peraturan mengenai pemenuhan kuota 30 persen itu sendiri dan dengan adanya kekhawatiran tersendiri ketika tidak sanggup mencari kader perempuan sebanyak 30 persen dari kuota ,maka partai tersebut tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum 2014 , bukan lantas untuk mencari sosok – sosok perempuan berkualitas yang mampu memegang amanah sekaligus menyalurkan aspirasi perempuan – perempuan Sampang sebagai wakil rakyat . Disusul dengan , merekrut teman – teman , saudara ,keluarga maupun kerabat pengurus laki – laki Dewan Pimpinan Cabang agar

dapat memenuhi kuota 30 persen tersebut tanpa memastikan kemampuan – kemampuan perempuan – perempuan yang direkrut tersebut dalam bidang sosial politik.

4.2 Saran

Dari uraian diatas , maka dapat penulis juga memiliki saran – saran. Pertama , berkaitan dengan proses kaderisasi perempuan di Sampang ,yakni meskipun terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam proses pengkaderan perempuan terutama dalam hal budaya di Sampang ,namun dalam hal ini bukan berarti tidak ada solusinya untuk tetap mendapatkan kader – kader yang memang berkualitas sesuai visi misi organisasi . Penulis berfikir bahwasanya ,Partai Hati Nurani Rakyat seharusnya dapat bergerak lebih awal dalam rangka menjaring kader – kader perempuan yang benar – benar berkualitas , dan menghimpun dukungan dari kaum wanita . Bukan hanya setahun sebelum Pemilihan Umum Calon Legislatif , tetapi akan jauh lebih baik jika lobi – lobi dan jaringan- jaringan itu dibentuk dari awal partai Hanura itu berdiri di Sampang , dan hendaknya proses kerjasama dan kaderisasi itu terus berlanjut setiap hari , dan setiap waktu . Hal ini diharapkan agar simpatisan dan loyalist Partai Hati Nurani Rakyat khususnya di daerah Sampang bisa bertambah banyak dari hari ke hari , dan itu dapat dijadikan sebagai modal suara , dan bahkan modal financial partai saat Pemilihan Umum tiba . Karena proses kaderisasi sendiri itu adalah pendidikan politik yang diberikan partai politik , seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat mampu menyelenggarakan Pembinaan Politik yang rutin dijalankan dari

ke waktu , bukan hanya menunggu menjelang politik terhadap masyarakat Sampang , agar para wanitanya mau membuka mata dan hatinya untuk senantiasa berkecimpung di dunia perpolitikan , serta untuk mengangkat citra Parti Hati Nurani Rakyat di Madura , bahwa partai ini memang partai baru yang memiliki cita – cita mulia untuk membenahi masyarakat , bukan partai yang pragmatis .

Kedua , masih mengenai system kaderisasi itu sendiri , yakni diharapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat , Kabupaten Sampang memiliki aturan – aturan yang baku dan detail mengenai syarat – syarat menjadi calon- calon legislative perempuannya , tidak hanya persyaratan yang cenderung umumsaja seperti mampu baca tulis , lulusan SMA , tidak memiliki identitas keanggotaan partai politik yang ganda . Tetapi juga harus mencantumkan kemampuan- kemampuan , prestasi – prestasi dan idealisme – idealisme seperti apa yang harus dimiliki seorang calon legislative perempuan , seperti memiliki kemampuan manajer social politik , memiliki kemampuan komunikasi yang baik yakni berorasi , bernegosiasi politik ,berkecimpung di dunia sosialpolitik minimal satu tahun , paham visi misi partai dan mampu mempertanggungjawabkannya , paham kebijakan umum , beridealisme pembangunan masyarakat , track record jujur dan berprestasi dan lain sebagainya .

Ketiga, mengenai kelanjutan penelitian ini sendiri yakni diharapkan aka nada penelitian yang mengupas lebih dalam tentang kaderisasi perempuan di Kabupaten Sampang , beserta dengan sumber dan operasi pendanaanya , sehingga hasil penelitian akan lebih komprehensif karena tidak hanya menyangkut bagaimana cara mengkader kaum perempuannya saja , akan tetapi berapa dana

yang dihabiskan untuk mendapatkan kader – kader perempuannya , dan darimana saja sumber pendanaan untuk mengkader kaum perempuan Sampang .